

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar pembangunan di daerah, Desa, dan kota semakin seimbang. Namun, pembangunan nasional masih menghadapi masalah ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia yang mempengaruhi kemiskinan di negara ini. Pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi daripada di kota. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 8.60% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 14.70%. Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini dengan fokus pada pembangunan desa dan memperbaiki tata pemerintahan dengan memperhatikan karakteristik *Good Governance*.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ kepentingan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahun pemerintah memberikan dana Desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan Desa. Pengalokasian dana oleh

pemerintah kabupaten untuk Desa, yang berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten kecuali dana alokasi khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016 Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan Desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di Desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka Desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016:143).

Dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Hal ini memberikan hak otonomi kepada Desa untuk mengelola keuangannya secara mandiri, baik itu dalam mengelola pendapatan maupun dalam mengelola anggaran pembelanjaan. Prinsip pengelolaan keuangan Desa yang harus dijunjung tinggi adalah transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam penganggaran Yesinia, (2018). Adapun untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa, diperlukan tiga pilar utama yaitu

transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pentingnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan Dana Desa.

Pemerintahan Indonesia saat ini terus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah maupun pembangunan Desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Karena itu terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya berdampak langsung pada kepentingan masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan Desa, pemerintahan Desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas (Wahyuddin, 2016:143).

Dalam mengelola sumber daya yang diamanahkan perlu adanya transparansi. Transparansi melibatkan penyediaan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara lengkap dan transparan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang diamanahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya juga berlaku dalam implementasi kebijakan di tingkat Desa. Dalam hal ini, pembangunan harus dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat Desa sebagai bagian dari

upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. (Fahri, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Nafidah dan Suryaningtyas, (2015) dengan judul penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Hasil penelitian menunjukkan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi telah berjalan dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang ada, dengan bukti adanya tahapan perencanaan kegiatan dapat dilakukan persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kegiatannya dibiayai oleh alokasi dana Desa. penelitian Auditya dan Lismawati tentang Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern sangat berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pendapatan Daerah Kota Gorontalo.

Ada penelitian Susliyanti, (2015) tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Trimuly. Hasil penelitian menjelaskan mengenai Perencanaan dan Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Desa

Trimulyo Kecamatan Jetis Bantu yang telah menerapkan bahwa prinsip partisipasif transparan dan *akuntability* adalah Proses Pelaporan Alokasi Dana Desa telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo sangat efektif yaitu sebesar 100% selain itu ADD memberi kontribusi sebesar 55,62% dari total pendapatan yang diterima pemerintah Desa.

Sengaji & Asyik, (2020) yang meneliti tentang Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan kebijakan Desa terhadap pembangunan Desa hasil untuk menunjukkan bahwa uji tersebut tidak mendukung hipotesis yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana Desa berpengaruh positif terhadap pembangunan Desa karena pengelolaan keuangan alokasi dana Desanya belum efektif.

Hasil penelitian ini menyatakan variable akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pendapatan Daerah Kota Gorontalo. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap aktivitas yang dilakukan dapat dievaluasi oleh masyarakat dan pengguna melalui informasi keuangan yang diberikan, ini merupakan bagian dari akuntabilitas. Selain itu, akuntabilitas juga termasuk dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kartasamita (1996:393), ada tiga upaya besar dalam pembangunan pedesaan, di antaranya adalah memberdayakan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengubah struktur sosial, dan meningkatkan

pertanggungjawaban keuangan yang mencakup integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Halim, 2007).

Menurut *Word Bank* transparansi adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas, termasuk informasi tentang kebijakan, program, dan tindakan pemerintah. Sedangkan menurut ahli ekonomi dan filsuf ini mengartikan transparansi sebagai elemen kunci dalam pemerintahan yang baik dan berkelanjutan ekonomi, karena membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk memberikan informasi dan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik Ismiarti, (2013:30). Pemberian informasi dan pengungkapan aktivitas dan kinerja finansial merupakan bagian dari akuntabilitas, dan pemerintah harus menjadi subyek pemberi informasi dalam pemenuhan hak publik. Annisaningrum, (2010:1) mengatakan untuk mencapai tujuan tersebut, entitas pelaporan harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan secara periodik. Akuntabilitas juga mengharuskan seseorang, badan hukum, atau pimpinan kolektif organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja dan tindakan mereka kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan di dalam suatu komunitas atau masyarakat. Menurut para ahli, partisipasi masyarakat adalah proses di mana individu atau kelompok terlibat dalam kegiatan kolektif, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang memengaruhi kehidupan mereka. Para ahli seperti *Sherry Arnstein*, *Roger Hart*, dan *Arnstein Lechner* telah mengembangkan teori dan kerangka kerja yang berfokus pada tingkat partisipasi dan pengaruh masyarakat dalam berbagai konteks, seperti pembangunan, lingkungan, dan kebijakan publik.

Pembangunan Desa selalu menjadi program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan Desa adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Program kinerja keuangan Desa ini dibagi pada masing-masing Desa dengan besaran dana yang kurang lebih sama, dengan asas pemerataan. Distribusi dana Desa untuk masing-masing Desa berbeda disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Putri.,dkk. (2021) melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli” Populasi pada penelitian ini

adalah masyarakat Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang telah memiliki hak suara dan/atau telah berusia 17 tahun, sedangkan yang dijadikan objek penelitian (sampel) yaitu sebanyak 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan (Budiati.,dkk. 2017). Dengan judul penelitian “Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal” Penelitian bermaksud untuk menganalisis persepsi dari aparatur pemerintah desa berdasarkan prinsip *Good Governance* dengan dimensi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dan kapasitas aparatur Desa terhadap kinerja pengelolaan dana Desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating. Penelitian dilakukan di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak pada pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana Desa yaitu kepala Desa, sekretaris Desa, bendahara, pelaksana kegiatan pembangunan, pelaksana kegiatan pemerintahan, ketua tim pengelola kegiatan dan tim penggerak kesejahteraan keluarga, pada 12 Desa dengan jumlah responden 84 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kapasitas aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pengendalian internal gagal

menjadi variabel moderasi pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan Desa.

Penelitian yang dilakukan (Setyawati, 2020). Dengan judul penelitian “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang)”. Bukti empiris yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat sedangkan untuk pengelolaan dan alokasi dana Desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diatas masih terdapat gap penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan Budiati., dkk, (2017) menunjukan bahwa bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kapasitas aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana Desa. Sebaliknya sistem pengendalian internal gagal menjadi variabel moderasi pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fitria, (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan untuk pengelolaan dan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada latar belakang diatas dan mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa dalam mewujudkan Desa yang mandiri dan sejahtera maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Pembangunan Desa Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Didesa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, untuk memudahkan untuk penyusunan tugas akhir ini penulis merumuskan masalah kedalam beberapa bentuk kalimat pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara?
3. Apakah Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara?
4. Apakah pembangunan Desa berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara?
5. Apakah transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pembangunan Desa berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Batasan variabel: variabel penelitian ini yaitu variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pembangunan Desa
2. Batasan waktu: pengambilan data penelitian dilaksanakan pada bulan april sampai juni 2023
3. Batasan lokasi: lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh positif transparansi terhadap kinerja keuangan Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Untuk menguji pengaruh positif akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara
3. Untuk menguji pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap kinerja keuangan Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara
4. Untuk menguji pengaruh positif pembangunan Desa terhadap kinerja keuangan Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara
5. Untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pembangunan Desa terhadap kinerja keuangan Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak - pihak membutuhkan informasi mengenai keuangan:

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menambah wawasan dan memperoleh pengetahuan peneliti berdasarkan hasil dari mencermati kejadian-kejadian yang nyata, lalu dipelajari melalui ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan khususnya dari mata kuliah akuntansi keuangan

2. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk rakyat yang ingin mengetahui mengenai Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa terhadap Kinerja Keuangan Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara.

3. Manfaat bagi pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa terhadap Kinerja Keuangan Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematik penulisan penelitian ini merupakan rangkaian dari uraian yang diteliti serta memberikan arahan dengan tujuan agar nantinya penulis mudah untuk memahami suatu sistem pembahasan dan permasalahan penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika.

Bab II: Kajian Pustaka dan Teori

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan topic penelitian untuk mendukung pembahasan atas masalah penelitian.

Bab III: Metoda Penelitian

Dalam bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan variabel penelitian, metode pengumpulan data dan analisis, serta teknik analisis data.

Bab IV: Data dan Analisis Data

Bab ini mendiskripsikan tentang objek dari penelitian yang dilakukan terhadap Desa Sifa Niha Kabupaten Timor Tengah Utara sertamembahas masalah dan hasil Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa Terhadap Kinerja Keuangan.

Bab V: Simpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang mana berasal dari hasil penelitian yang dilakukan yang mana kesimpulan dan saran tadi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari hasil peneliti.